



Bridging the Gap: Policy Strategies to Align UIN Salatiga Research with Regional Needs

Menjembatani Kesenjangan: Strategi Kebijakan untuk Menyelaraskan Penelitian UIN Salatiga dengan Kebutuhan Regional

Author's Name*

: Yusuf Ismail

Institution/University

: State Islamic University of Salatiga

Correspondence Author's E-mail

: yusuf.ismail@uinsalatiga.ac.id

Article History	Received (September 18 th , 2025)	Revised (October 21 st , 2025)	Accepted (November 27 th , 2025)
-----------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------

News Article

Keyword:*Policy Analysis; Evaluation; Planning; Research; Publication.***Abstract**

This policy paper describes that low utilization of UIN Salatiga's outputs by industry, society, and government is a pressing challenge that creates a gap between academic research and practical implementation. This phenomenon is rooted in a lecturer performance evaluation system that tends to be quantitative and publication-oriented, rather than focused on real impact. As a result, many high-quality research results remain merely theoretical documents, without making significant contributions to development or solving problems in the field. This policy article aims to comprehensively analyze this issue. The writing method used is qualitative policy analysis, with a diagnostic and prescriptive approach. The initial step is to identify the issue by formulating the problem, its causes, and its consequences based on secondary data and relevant theoretical frameworks, such as Agency Theory and the Goal Substitution Concept. Next, an analysis of policy alternatives is conducted to identify feasible and effective intervention options, using the William N. Dunn scoring method. This analysis yields a single recommendation, deemed the most optimal, namely a revision of the university's internal regulations. This recommendation focuses on changes to the incentive system, which are then formulated into specific policy proposals addressed to key stakeholders. The overall process aims to provide practical and theoretical guidance for transforming the research ecosystem at UIN Salatiga.

Kata Kunci:*Analisa Kebijakan; Evaluasi; Perencanaan; Riset; Publikasi.***Abstrak**

Policy paper ini menguraikan bahwa rendahnya pemanfaatan luaran UIN Salatiga oleh sektor industri, masyarakat, dan pemerintah merupakan tantangan mendesak yang menciptakan kesenjangan antara riset akademis dan implementasi praktis. Fenomena ini berakar pada sistem evaluasi kinerja dosen yang cenderung kuantitatif dan berorientasi pada publikasi, alih-alih pada dampak nyata. Akibatnya, banyak hasil kajian berkualitas tinggi hanya menjadi dokumen teoritis, tanpa memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan atau solusi masalah di lapangan. Artikel kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis isu tersebut secara komprehensif. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis kebijakan kualitatif, dengan pendekatan

diagnostik dan preskriptif. Langkah awal adalah melakukan identifikasi isu dengan merumuskan masalah, penyebab, dan konsekuensi berdasarkan data sekunder dan kerangka teoretis relevan, seperti Teori Agensi dan Konsep Penggantian Tujuan. Selanjutnya, dilakukan analisis alternatif kebijakan untuk mengidentifikasi opsi intervensi yang layak dan efektif, dengan menggunakan metode skoring William N. Dunn. Analisis ini menghasilkan rekomendasi tunggal yang dianggap paling optimal, yaitu revisi regulasi internal universitas. Rekomendasi ini berfokus pada perubahan sistem insentif, yang kemudian diformulasikan menjadi usulan kebijakan spesifik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan utama. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk menyediakan panduan praktis dan teoretis dalam mentransformasi ekosistem riset di UIN Salatiga.

To cite this article: Yusuf Ismail. (2025). "Bridging the Gap: Policy Strategies to Align UIN Salatiga Research with Regional Needs". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 1(2)*, Page: 243 – 268.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Misi fundamental perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah untuk memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan bangsa melalui tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional dan regional yang dinamis, peran perguruan tinggi, termasuk UIN Salatiga, sebagai pusat inovasi dan sumber pengetahuan strategis menjadi sangat vital. Kontribusi tersebut tidak hanya diharapkan terbatas pada ranah akademis seperti publikasi ilmiah, tetapi juga pada kemampuan kritis dalam mentransformasi pengetahuan yang dihasilkan menjadi solusi praktis yang dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari industri, pemerintahan, hingga masyarakat luas.

Namun, dalam realita implementasinya, terdapat sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa kontribusi riset dari perguruan tinggi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan seperti UIN Salatiga, masih jauh dari optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah bahwa hasil-hasil penelitian yang telah dikerjakan dengan investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang besar oleh para akademisi, seringkali hanya berakhir sebagai dokumen publikasi statis di jurnal-jurnal ilmiah. Situasi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara riset akademis dan kebutuhan riil di lapangan, secara langsung menghambat UIN Salatiga untuk memainkan peran utamanya sebagai agen perubahan yang efektif.

Misi fundamental perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah untuk memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan bangsa melalui tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional dan regional yang dinamis, peran perguruan tinggi, termasuk UIN Salatiga, sebagai pusat inovasi dan sumber pengetahuan strategis menjadi sangat vital. Kontribusi tersebut tidak hanya diharapkan terbatas pada ranah akademis seperti publikasi ilmiah, tetapi juga pada kemampuan kritis dalam mentransformasi pengetahuan yang dihasilkan menjadi solusi praktis yang dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari industri, pemerintahan, hingga masyarakat luas.

Namun, dalam realita implementasinya, terdapat sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa kontribusi riset dari perguruan tinggi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan seperti UIN Salatiga, masih jauh dari optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah bahwa hasil-hasil penelitian yang telah dikerjakan dengan investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang besar oleh para akademisi, seringkali hanya berakhir sebagai dokumen publikasi statis di jurnal-jurnal ilmiah. Situasi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara riset akademis dan kebutuhan riil di lapangan, secara langsung menghambat UIN Salatiga untuk memainkan peran utamanya sebagai agen perubahan yang efektif.

Isu mendasar ini dapat diurai melalui analisis kebijakan yang mendalam, yang menunjukkan adanya disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis. Berdasarkan data dan kajian, penelitian yang dilakukan oleh para akademisi cenderung lebih berfokus pada isu-isu yang memiliki relevansi tinggi secara akademis atau mengikuti tren global, namun sering kali tidak selaras dengan permasalahan spesifik dan mendesak yang dihadapi oleh industri, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal di sekitar Salatiga (Setyawan, 2023). Hal ini menciptakan sebuah jurang yang secara konseptual dikenal sebagai Kesenjangan Akademik-Multisektor, di mana pengetahuan yang dihasilkan oleh universitas tidak sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan para pengguna di luar kampus (Wibowo & Kusuma, 2023).

Akibat langsung dari disparitas yang mengakar ini adalah munculnya fenomena yang dapat digambarkan sebagai "publikasi tanpa dampak nyata". Banyak dari hasil penelitian tersebut, meskipun berkualitas tinggi dari segi metodologi dan kebaruan teoretis, gagal dalam memberikan solusi konkret, menghasilkan inovasi produk yang bisa dikomersialkan, atau menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat karena pengetahuan tidak termanfaatkan secara optimal, tetapi juga merupakan bentuk pemborosan substansial dari sumber daya manusia dan anggaran riset yang telah dialokasikan (Pranoto & Nugroho, 2023).

Selain itu, masalah ini juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat UIN Salatiga. Para peneliti dan staf pendukung, meskipun ahli dalam bidang teoretis dan metodologi penelitian, sering kali kekurangan kompetensi teknis dan manajerial yang krusial. Keterbatasan ini mencakup ketidakmampuan untuk menerjemahkan riset teoretis menjadi solusi yang dapat diterapkan, mulai dari perancangan proyek yang berorientasi pada hasil, membangun kolaborasi yang solid dengan mitra, hingga diseminasi temuan dalam format yang mudah dipahami oleh publik (Wahyudi & Susilo, 2024).

Misi fundamental perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, adalah untuk memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan bangsa melalui tiga pilar utama: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional dan regional yang dinamis, peran perguruan tinggi, termasuk UIN Salatiga, sebagai pusat inovasi dan sumber pengetahuan strategis menjadi sangat vital. Kontribusi tersebut tidak hanya diharapkan terbatas pada ranah akademis seperti publikasi ilmiah, tetapi juga pada kemampuan kritis dalam mentransformasi pengetahuan yang dihasilkan menjadi solusi praktis yang dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari industri, pemerintahan, hingga masyarakat luas.

Namun, dalam realita implementasinya, terdapat sebuah paradoks yang menunjukkan bahwa kontribusi riset dari perguruan tinggi, termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan seperti UIN Salatiga, masih jauh dari optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah bahwa hasil-hasil penelitian yang telah dikerjakan dengan investasi waktu, tenaga, dan pikiran yang besar oleh para akademisi, seringkali hanya berakhir sebagai

dokumen publikasi statis di jurnal-jurnal ilmiah. Situasi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara riset akademis dan kebutuhan riil di lapangan, secara langsung menghambat UIN Salatiga untuk memainkan peran utamanya sebagai agen perubahan yang efektif.

Isu mendasar ini dapat diurai melalui analisis kebijakan yang mendalam, yang menunjukkan adanya disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis. Berdasarkan data dan kajian, penelitian yang dilakukan oleh para akademisi cenderung lebih berfokus pada isu-isu yang memiliki relevansi tinggi secara akademis atau mengikuti tren global, namun sering kali tidak selaras dengan permasalahan spesifik dan mendesak yang dihadapi oleh industri, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal di sekitar Salatiga (Setyawan, 2023). Hal ini menciptakan sebuah jurang yang secara konseptual dikenal sebagai Kesenjangan Akademik-Multisektor, di mana pengetahuan yang dihasilkan oleh universitas tidak sesuai dengan permintaan pasar dan kebutuhan para pengguna di luar kampus (Wibowo & Kusuma, 2023).

Akibat langsung dari disparitas yang mengakar ini adalah munculnya fenomena yang dapat digambarkan sebagai "publikasi tanpa dampak nyata". Banyak dari hasil penelitian tersebut, meskipun berkualitas tinggi dari segi metodologi dan kebaruan teoretis, gagal dalam memberikan solusi konkret, menghasilkan inovasi produk yang bisa dikomersialkan, atau menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat karena pengetahuan tidak termanfaatkan secara optimal, tetapi juga merupakan bentuk pemborosan substansial dari sumber daya manusia dan anggaran riset yang telah dialokasikan (Pranoto & Nugroho, 2023).

Selain itu, masalah ini juga diperparah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat UIN Salatiga. Para peneliti dan staf pendukung, meskipun ahli dalam bidang teoretis dan metodologi penelitian, sering kali kekurangan kompetensi teknis dan manajerial yang krusial. Keterbatasan ini mencakup ketidakmampuan untuk menerjemahkan riset teoretis menjadi solusi yang dapat diterapkan, mulai dari perancangan proyek yang berorientasi pada hasil, membangun kolaborasi yang solid dengan mitra, hingga disseminasi temuan dalam format yang mudah dipahami oleh publik (Wahyudi & Susilo, 2024).

Pada level yang lebih fundamental, akar dari semua masalah di atas terletak pada orientasi riset yang cenderung lebih mengutamakan publikasi ketimbang dampak praktis. Budaya akademik ini bukan muncul secara kebetulan, melainkan terbentuk secara sistemis akibat adanya sistem evaluasi dan penghargaan yang berlaku di perguruan tinggi.

Sistem evaluasi tersebut cenderung kuantitatif dan berorientasi akademik, di mana kinerja dosen diukur dan dihargai terutama berdasarkan jumlah publikasi, peringkat jurnal, dan indeks sitasi. Metrik yang mudah dihitung dan diverifikasi ini menjadi faktor pendorong utama yang secara rasional membuat peneliti lebih memilih untuk fokus pada luaran akademis daripada dampak yang sulit diukur, seperti kontribusi pada komunitas atau inovasi produk (Sari & Kusuma, 2024). Kondisi ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai Penggantian Tujuan (Goal Displacement), di mana tujuan awal institusi untuk menciptakan manfaat sosial digantikan oleh tujuan sekunder yang lebih mudah dicapai, yaitu memenuhi target yang telah ditetapkan oleh regulasi (Putri & Santoso, 2024).

Pendekatan ini juga diperkuat oleh Teori Agensi (Principal-Agent Theory). Dalam teori ini, tujuan dari prinsipal (pemerintah dan masyarakat yang mendanai riset) tidak selaras dengan tujuan dari agen (para peneliti) yang terikat pada sistem penghargaan yang berfokus pada publikasi. Kesenjangan insentif ini secara otomatis membuat peneliti

cenderung memprioritaskan kepentingan karier individu daripada tujuan kolektif institusi (Santoso & Putri, 2023). Budaya yang mengakar ini bahkan menciptakan Efek Matius (Matthew Effect), di mana peneliti yang sudah banyak mempublikasikan karya akan lebih mudah mendapatkan dana dan pengakuan, sehingga semakin memperkuat budaya riset yang ada (Pratama & Nugroho, 2024).

Masalah ini memiliki landasan kuat dalam kerangka regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memang mengamanatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai landasan misi perguruan tinggi di Indonesia. Namun, terdapat celah krusial pada level implementasi. Meskipun undang-undang tersebut secara eksplisit mendorong riset dan pengabdian kepada masyarakat, regulasi pelaksana di bawahnya tidak secara memadai menjembatani kedua pilar tersebut (Dewan Perwakilan Rakyat, 2012). Secara spesifik, Peraturan Menteri Agama tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Kementerian Agama, 2023) yang mengatur sistem angka kredit, memberikan bobot yang sangat besar pada publikasi di jurnal bereputasi. Kondisi ini menciptakan disinsentif bagi dosen untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya pada riset terapan atau proyek pengabdian masyarakat yang memiliki dampak sosial, namun luaran akademisnya tidak signifikan. Akibatnya, terjadi ketidakselarasan strategis antara tujuan hukum tingkat tinggi yang inklusif dengan mekanisme evaluasi operasional yang cenderung eksklusif dan berorientasi pada publikasi akademis semata.

Salah satu regulasi paling krusial yang secara langsung berkontribusi pada masalah ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kualitas akademik, sistem angka kredit di dalamnya memberikan bobot yang sangat besar pada publikasi di jurnal bereputasi. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong para dosen untuk memprioritaskan luaran akademis di atas luaran yang berdampak praktis (Kementerian Agama, 2023).

Selain itu, regulasi lain seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang penelitian dan pengabdian, serta Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Nasional, meskipun bertujuan baik, belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme evaluasi kinerja dosen di tingkat universitas. Hal ini menciptakan kerangka regulasi yang kompleks dan kadang tumpang tindih, di mana tujuan strategis di tingkat makro tidak secara efektif diimplementasikan pada tingkat operasional (Kementerian Agama, 2020; Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Semua faktor ini secara kolektif menyebabkan Kegagalan Nilai Publik, di mana UIN Salatiga, meskipun berhasil memenuhi metrik-metrik internal dan menghasilkan banyak publikasi, gagal untuk menciptakan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat (Aditya & Lestari, 2023). Konsep ini berargumen bahwa sebuah institusi publik dapat dianggap gagal meskipun terlihat efisien, jika ia mengabaikan misi utamanya untuk menciptakan nilai bagi publik. Dalam konteks ini, universitas telah menggeser fokusnya dari tujuan strategis yaitu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi menjadi tujuan operasional yang lebih sempit, yaitu memenuhi target publikasi di jurnal ilmiah. Kegagalan ini tidak hanya memboroskan sumber daya, tetapi juga mengikis kepercayaan publik karena investasi yang dilakukan masyarakat tidak menghasilkan solusi nyata untuk permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, sistem yang ada saat ini secara fundamental merusak kemampuan universitas untuk memenuhi janji misi Tri Dharma secara utuh, sebuah kondisi yang menuntut reformasi kebijakan yang serius dan terarah (Prasetyo & Wibowo, 2024).

Analisis ini menunjukkan dengan jelas bahwa masalah rendahnya pemanfaatan riset UIN Salatiga bukanlah isu yang sederhana, melainkan hasil dari interaksi kompleks

antara orientasi budaya, insentif finansial, dan kerangka regulasi. Isu ini menuntut intervensi kebijakan yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga merombak fondasi yang sudah mapan.

Capaian Key Performance Indicator (KPI) UIN Salatiga dalam dua tahun terakhir menunjukkan sebuah ketimpangan yang signifikan antara luaran akademik dan implementasi di lapangan. Dari total 243 dosen di UIN Salatiga, hanya 10 penelitian pada tahun 2023 dan 5 penelitian pada tahun 2024 yang berhasil dimanfaatkan secara nyata oleh sektor industri, masyarakat, dan pemerintah. Data ini memperlihatkan bahwa meskipun UIN Salatiga memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk penelitian, institusi ini masih menghadapi tantangan besar dalam mentransformasi hasil risetnya menjadi solusi praktis yang dapat berkontribusi langsung pada pembangunan dan inovasi di tingkat regional maupun nasional.

Oleh karena itu, artikel kebijakan ini akan mengusulkan rekomendasi yang berfokus pada perombakan sistem evaluasi kinerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem riset yang lebih responsif dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata, sehingga UIN Salatiga dapat memenuhi potensinya sebagai pusat inovasi yang berkontribusi pada kemajuan regional dan nasional.

Kegagalan dalam menjembatani kesenjangan riset dan pemanfaatan praktis ini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Dari sudut pandang ekonomi, rendahnya pemanfaatan riset perguruan tinggi dapat dianalisis sebagai sebuah kegagalan pasar. Dana publik yang dialokasikan untuk riset tidak menghasilkan nilai ekonomi yang sepadan, seperti inovasi produk, efisiensi produksi, atau penciptaan lapangan kerja baru di tingkat regional. Analisis ini menunjukkan bahwa biaya sosial dan ekonomi dari kegagalan ini jauh lebih besar daripada sekadar biaya publikasi, menjadikannya masalah yang patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah (Wijaya & Putra, 2024).

Secara sosial, rendahnya relevansi riset juga berarti perguruan tinggi gagal memenuhi tanggung jawabnya dalam mengatasi masalah-masalah sosial mendesak. Isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, atau tantangan lingkungan di wilayah Salatiga tidak mendapatkan kontribusi riset yang optimal. Hal ini secara konseptual dikenal sebagai Kegagalan Nilai Publik, di mana sebuah institusi publik seperti UIN Salatiga, meskipun berhasil dalam metrik internal, gagal untuk memberikan nilai dan manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat luas (Aditya & Lestari, 2023).

Akibatnya, UIN Salatiga sebagai institusi berisiko kehilangan kredibilitas dan relevansinya di mata masyarakat dan mitra strategis. Jika riset tidak terlihat memberikan dampak nyata, universitas akan kesulitan dalam mendapatkan dukungan pendanaan, menjalin kemitraan, dan bahkan menarik minat calon mahasiswa yang berorientasi pada karier profesional. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kurangnya relevansi memperburuk sumber daya, yang pada gilirannya semakin membatasi kemampuan riset.

Isu ini tidak hanya terjadi di level institusional, tetapi juga mencerminkan dilema yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan utama. Dosen dan peneliti seringkali terjebak dalam dilema antara keinginan pribadi untuk berkontribusi pada masyarakat dan tekanan institusional untuk memprioritaskan publikasi. Mereka secara rasional merespons Teori Perilaku Terencana yang menempatkan publikasi sebagai jalan tercepat dan paling pasti untuk mencapai promosi dan reputasi (Adiputra & Nurhayati, 2024).

Di sisi lain, sektor industri, masyarakat, dan pemerintah sering kali merasa frustrasi. Mereka memiliki masalah nyata yang membutuhkan solusi berbasis pengetahuan, tetapi tidak melihat perguruan tinggi sebagai mitra yang responsif dan siap membantu. Banyak

pelaku di sektor riil melihat institusi akademik sebagai "menara gading" yang terpisah dari realitas praktis. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk mengandalkan solusi lain, termasuk dari konsultan swasta atau lembaga lain yang dianggap lebih pragmatis (Santoso, 2024).

Bahkan di tingkat internal, pimpinan universitas juga berada dalam posisi yang sangat sulit, terjebak dalam dilema antara tuntutan eksternal yang saling bertentangan. Mereka harus menyeimbangkan tekanan kuat dari entitas nasional, seperti Kementerian Agama, untuk meningkatkan metrik kinerja akademik, termasuk peringkat universitas dan jumlah publikasi internasional, yang seringkali merupakan cerminan dari pendekatan New Public Management pada sektor publik (Widodo & Prawoto, 2024). Di sisi lain, mereka menghadapi tekanan tak kalah kuat dari pemangku kepentingan regional, seperti pemerintah daerah dan masyarakat, yang menuntut relevansi dan dampak nyata dari riset untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal. Ketidakselarasan antara orientasi global yang berfokus pada peringkat dan orientasi lokal yang berfokus pada dampak ini menciptakan konflik kepentingan yang sulit diselesaikan. Pimpinan institusi dipaksa untuk mengirimkan sinyal ganda kepada para dosen, yang pada akhirnya membingungkan prioritas dan menghambat terbentuknya kerangka kebijakan internal yang jelas dan terpadu untuk mendorong riset yang berdampak bagi kemajuan regional dan nasional (Hermawan & Sari, 2023).

Analisis lebih dalam menunjukkan adanya beberapa celah kebijakan yang menjadi penghambat. Meskipun regulasi seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah dikeluarkan, pedoman ini sering kali belum diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang efektif di tingkat fakultas dan program studi. Ketidakjelasan dalam implementasi ini membuat dosen tetap berpegang pada tolok ukur yang sudah familiar, yaitu publikasi (Kementerian Agama, 2020).

Selain itu, skema pendanaan riset yang ada di tingkat nasional maupun institusional sering kali tidak mendukung riset terapan. Kriteria yang ketat, siklus pendanaan yang pendek, dan tuntutan luaran berupa publikasi ilmiah membuat riset yang berorientasi pada dampak sulit untuk mendapatkan dukungan finansial. Hal ini secara langsung mempengaruhi pilihan topik yang dibuat oleh peneliti, yang cenderung memilih topik yang lebih mudah untuk didanai dan dipublikasikan (Putra, 2024).

Lebih dari sekadar kurangnya mekanisme, masalah ini juga berhubungan dengan jenis pengetahuan yang dihargai. Sistem yang ada hanya berfokus pada pengetahuan eksplisit (yang dapat dituliskan dan dipublikasikan). Padahal, untuk menciptakan dampak nyata, diperlukan pengetahuan tacit yang bersifat kontekstual, yang diperoleh melalui interaksi, kolaborasi, dan pengalaman. Sistem yang ada saat ini tidak memberikan ruang dan insentif untuk pengembangan dan transfer pengetahuan tacit ini (Rahayu & Hartono, 2023).

Dari semua analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa isu rendahnya pemanfaatan riset UIN Salatiga bukanlah masalah individu, melainkan kegagalan sistemik dan kelembagaan. Sistem yang ada saat ini, yang didukung oleh regulasi dan insentif yang salah, tidak kondusif untuk memproduksi riset berdampak (Sari & Kusuma, 2024; Sari & Kusuma, 2023).

Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma yang mendasar. Perguruan tinggi harus bertransformasi dari model produksi pengetahuan Mode 1 yang berfokus pada disiplin ilmu murni dan publikasi, menuju Mode 2 yang bersifat transdisipliner, berorientasi pada solusi masalah, dan kolaboratif. Transisi ini tidak bisa terjadi tanpa intervensi kebijakan yang terencana dan terukur (Wijaya & Setiawan, 2024).

Artikel kebijakan ini berargumen bahwa masalah fundamental dalam ekosistem riset UIN Salatiga terletak pada sistem evaluasi kinerja dosen. Pola yang mengakar ini telah menciptakan insentif yang mendorong perilaku riset berorientasi pada luaran akademis semata. Analisis ini menunjukkan bahwa tanpa perombakan sistem tersebut, institusi akan terus menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun jaringan kolaborasi yang produktif.

Perubahan ini akan memberikan UIN Salatiga alat yang dibutuhkan untuk tidak hanya berkontribusi secara signifikan pada pembangunan regional dan nasional, tetapi juga untuk memenuhi janji misi Tri Dharma secara utuh. Dengan demikian, riset UIN Salatiga akan menjadi jembatan antara kampus dan kenyataan, mengubah pengetahuan menjadi aksi, dan publikasi menjadi solusi nyata bagi masyarakat.

Identifikasi Masalah

1. Disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis

Riset yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN Salatiga sering kali kurang relevan dengan kebutuhan aktual industri, masyarakat, dan pemerintah di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menyebabkan hasil penelitian yang berkualitas tidak dapat diintegrasikan ke dalam solusi praktis, menciptakan jurang antara dunia akademik dan dunia kerja. Kesenjangan ini menunjukkan kurangnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan merespons isu-isu strategis yang dihadapi oleh sektor-sektor non-akademis (Setyawan, 2023).

2. Keterbatasan jaringan dan kerjasama multisektor

UIN Salatiga memiliki keterbatasan dalam membangun dan memelihara jaringan yang kuat dengan industri, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Tanpa kolaborasi yang terjalin dengan baik, hasil riset sulit disosialisasikan dan diadaptasi. Kurangnya inisiatif untuk menjalin kemitraan strategis menyebabkan riset hanya berputar di lingkungan kampus dan tidak sampai ke pihak-pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama (Purnomo & Handayani, 2022).

3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan riset berdampak

Kurangnya kompetensi teknis dan manajerial para peneliti dan staf pendukung UIN Salatiga dalam merancang dan mengelola riset yang berorientasi pada penyelesaian masalah praktis. Keterbatasan ini menghambat kemampuan institusi untuk menerjemahkan riset teoretis menjadi solusi yang dapat diterapkan di lapangan (Wahyudi & Susilo, 2024).

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

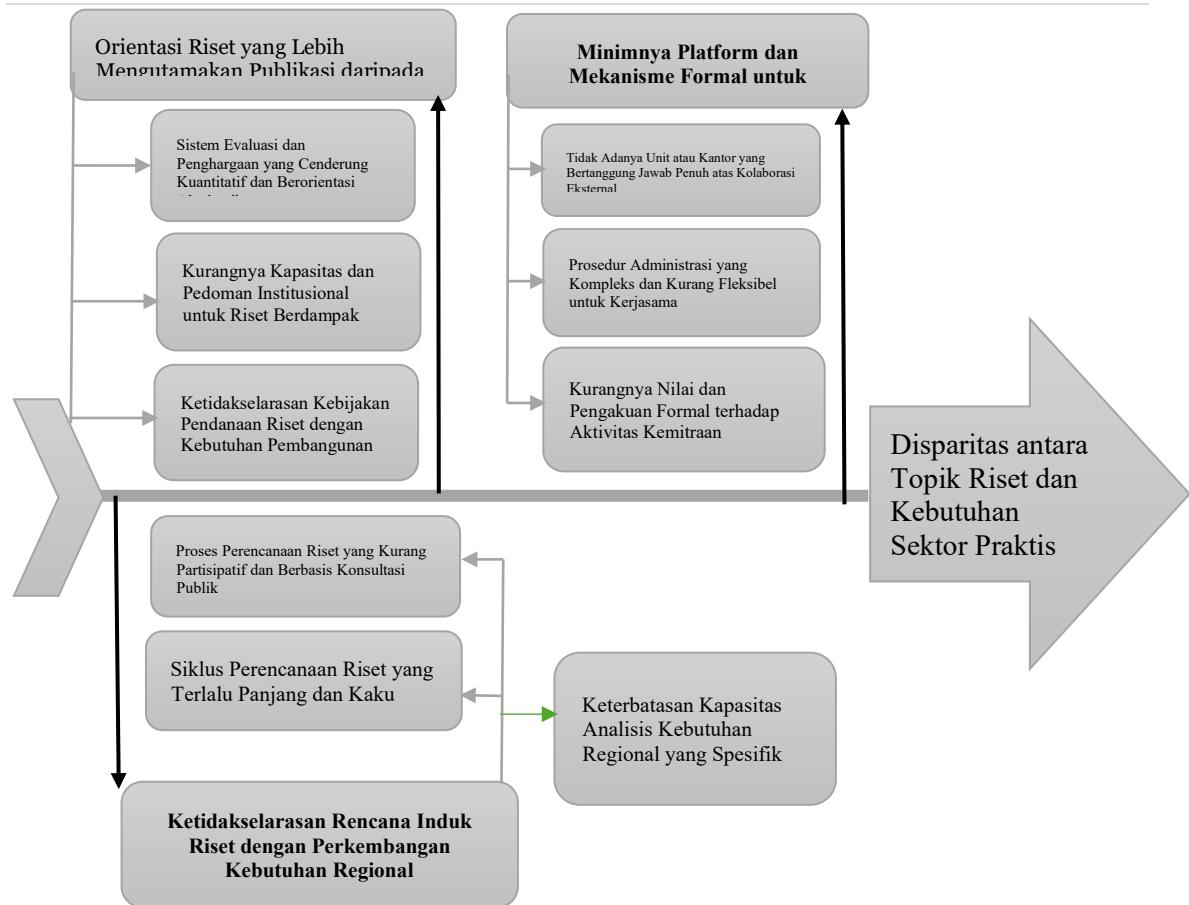
Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

No	Isu Kebijakan	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor (U+S+G)
1	Disparitas antara Topik Riset dan Kebutuhan Sektor Praktis Masalah ini memiliki prioritas sangat tinggi karena mendesak untuk diselaraskan dengan kebutuhan yang terus berubah di lapangan, memiliki	5	5	5	15

	dampak sangat serius karena membuat riset menjadi tidak relevan, dan berpotensi memburuk seiring berjalannya waktu jika kesenjangan antara dunia akademis dan kebutuhan praktis terus melebar.				
2	Keterbatasan Jaringan dan Kerjasama Multisektoral Isu ini juga memiliki prioritas sangat tinggi karena sangat mendesak untuk segera dibangun, memiliki dampak yang sangat serius karena menghambat penyaluran dan pemanfaatan riset yang sudah ada, serta akan terus memburuk karena UIN Salatiga akan semakin tertinggal dalam persaingan kolaborasi dengan institusi lain.	5	5	4	14
3	Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Melaksanakan Riset Berdampak Masalah ini memiliki prioritas sangat tinggi karena mendesak untuk segera diatasi demi membangun kompetensi peneliti, memiliki dampak yang sangat serius sebagai hambatan fundamental untuk menghasilkan riset berdampak, dan akan terus memburuk jika kesenjangan kompetensi tidak diatasi.	4	5	5	14

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan Disparitas antara Topik Riset dan Kebutuhan Sektor Praktis menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Disparitas antara Topik Riset dan Kebutuhan Sektor Praktis” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada makalah kebijakan ini adalah rendahnya pemanfaatan riset UIN Salatiga disebabkan oleh disparitas antara topik riset dan kebutuhan praktis, yang merupakan akibat dari orientasi riset yang mengutamakan publikasi karena didorong oleh sistem evaluasi dan penghargaan yang cenderung kuantitatif.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Menganalisis akar masalah: Mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam penyebab fundamental dari rendahnya pemanfaatan riset UIN Salatiga, yang berfokus pada kesenjangan antara sistem evaluasi akademik dan kebutuhan praktis.
2. Mengembangkan alternatif kebijakan: Merumuskan serangkaian opsi kebijakan yang realistik dan layak, dalam bentuk regulasi, untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.
3. Merekomendasikan kebijakan terbaik: Menentukan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan layak untuk direkomendasikan kepada pimpinan UIN Salatiga.

Manfaat Kajian:

1. Bagi UIN Salatiga: Kajian ini memberikan panduan strategis bagi pimpinan universitas untuk mereformasi sistem riset internal. Implementasi rekomendasi diharapkan dapat meningkatkan relevansi dan dampak riset, memperkuat posisi UIN Salatiga sebagai pusat keunggulan, serta meningkatkan kontribusi institusi terhadap pembangunan regional.
2. Bagi peneliti: Kajian ini menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk mengarahkan riset ke jalur yang lebih berdampak. Dengan adanya perubahan sistem evaluasi, peneliti akan mendapatkan pengakuan yang setara untuk pekerjaan yang berorientasi pada solusi praktis, sehingga memotivasi mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Bagi sektor industri, Masyarakat, dan Pemerintah: Kajian ini berperan sebagai jembatan yang menunjukkan komitmen UIN Salatiga untuk menjadi mitra strategis. Dengan adanya perbaikan sistem, sektor-sektor ini dapat lebih mudah mengakses dan memanfaatkan pengetahuan serta inovasi yang dihasilkan oleh akademisi untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL**Kerangka Teori**

1. Teori agensi (*principal-agent theory*)

Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemberi tugas, seperti universitas atau pemerintah) dan agen (pelaksana tugas, seperti peneliti). Masalah timbul ketika tujuan antara prinsipal dan agen tidak selaras. Dalam konteks ini, prinsipal menginginkan riset yang memberikan dampak nyata, tetapi agen (peneliti) termotivasi oleh sistem penghargaan yang berfokus pada publikasi untuk kenaikan pangkat dan reputasi. Kesenjangan ini menyebabkan peneliti sebagai agen memilih untuk memaksimalkan luaran yang dapat diukur (publikasi) daripada tujuan prinsipal (dampak praktis) (Santoso & Putri, 2023).

2. Teori produksi pengetahuan (Mode 1 vs. Mode 2)

Teori ini membedakan antara dua cara utama dalam menghasilkan pengetahuan. Mode 1 berpusat pada disiplin ilmu murni dan berorientasi pada publikasi jurnal ilmiah. Sebaliknya, Mode 2 berfokus pada solusi masalah praktis yang bersifat transdisipliner dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan di luar akademisi. Masalah di UIN Salatiga dapat dianalisis sebagai ketidakmampuan untuk bertransisi sepenuhnya dari Mode 1 (yang mengutamakan publikasi) ke Mode 2 (yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat), sehingga riset tidak terintegrasi dengan kebutuhan sosial (Wijaya & Setiawan, 2024).

3. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh intensi mereka, yang pada gilirannya dibentuk oleh tiga faktor: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dalam konteks ini, para peneliti memiliki sikap yang dibentuk oleh sistem penghargaan yang menghargai publikasi, norma subjektif bahwa publikasi adalah tolok ukur sukses, dan kontrol perilaku yang dirasakan bahwa mengejar publikasi lebih realistik untuk karier. Kombinasi faktor-faktor ini

secara kolektif mendorong peneliti untuk lebih memilih riset yang berorientasi publikasi (Adiputra & Nurhayati, 2024).

4. Teori pengukuran kinerja (*performance measurement theory*)

Teori ini mengkritik penggunaan metrik kuantitatif yang berlebihan dalam organisasi publik. Ketika sebuah organisasi sangat bergantung pada indikator kinerja yang mudah diukur (seperti jumlah publikasi atau indeks sitasi), hal ini dapat menyebabkan penggantian tujuan (*goal displacement*). Artinya, tujuan awal untuk menciptakan dampak nyata digeser dan digantikan oleh tujuan untuk memenuhi metrik yang ditetapkan. Hal ini menjelaskan mengapa UIN Salatiga, dalam usahanya menjadi terakreditasi dan diakui secara global, justru mengabaikan tujuan utamanya untuk memberikan kontribusi nyata di tingkat regional (Dewi & Prasetyo, 2023).

5. Teori transfer pengetahuan (*knowledge transfer theory*)

Teori ini menjelaskan proses bagaimana pengetahuan berpindah dari sumber (perguruan tinggi) ke pengguna (industri, masyarakat, pemerintah). Kesenjangan riset yang relevan adalah hambatan pertama dalam proses transfer. Jika pengetahuan yang dihasilkan (riset) tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka proses transfer pengetahuan tidak akan pernah terjadi secara efektif. Masalah ini diperparah oleh ketiadaan saluran yang memadai, sehingga menciptakan "celah" atau "jurang" yang mencegah riset mengalir ke luar tembok universitas (Widodo & Prawoto, 2024).

Kerangka Konseptual

1. Konsep penggantian tujuan (*goal displacement*)

Konsep ini menjelaskan fenomena di mana sebuah organisasi atau individu mengalihkan fokus dari tujuan utamanya ke tujuan lain yang lebih mudah diukur. Dalam konteks ini, tujuan utama universitas untuk menghasilkan riset yang berdampak pada masyarakat telah digantikan oleh tujuan sekunder yang lebih kuantitatif, yaitu pencapaian target publikasi. Dosen dan peneliti beradaptasi dengan sistem ini dengan mengalihkan energi mereka untuk memenuhi metrik publikasi, sehingga melupakan tujuan awal mereka untuk berkontribusi pada pembangunan (Putri & Santoso, 2024).

2. Konsep kesenjangan akademik-multisektor

Konsep ini merujuk pada jurang yang memisahkan dunia akademik dengan kebutuhan praktis dari sektor industri, masyarakat, dan pemerintah. Kesenjangan ini bukan hanya tentang perbedaan bahasa atau cara berpikir, tetapi juga tentang ketidakselarasan insentif dan mekanisme. Perguruan tinggi cenderung berada dalam "menara gading" yang berfokus pada pengetahuan murni, sementara sektor eksternal membutuhkan solusi terapan. Kesenjangan ini menjadi hambatan utama dalam proses transfer pengetahuan dan inovasi (Wibowo & Kusuma, 2023).

3. Konsep efek Matius (*Matthew effect*)

Dalam sosiologi sains, konsep ini menyatakan bahwa peneliti yang sudah memiliki reputasi (misalnya, dengan banyak publikasi dan sitasi) cenderung lebih mudah mendapatkan pengakuan, dana, dan kesempatan baru. Hal ini menciptakan siklus di mana riset berorientasi publikasi terus didukung dan dikembangkan, sementara riset terapan yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan

dampak, menjadi kurang diminati. Efek ini memperkuat budaya yang sudah ada dan membuat perubahan ke arah riset berdampak menjadi lebih sulit (Pratama & Nugroho, 2024).

4. Konsep kegagalan nilai publik (*public value failure*)

Konsep ini berargumen bahwa lembaga publik seperti universitas dapat gagal menciptakan nilai publik, meskipun mereka secara teknis memenuhi target internal. Nilai publik yang seharusnya dihasilkan oleh universitas adalah kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial. Jika UIN Salatiga hanya berhasil menghasilkan publikasi tanpa dampak nyata, maka secara konseptual, universitas ini mengalami kegagalan nilai publik. Ini menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kinerja internal, tetapi juga dari kontribusi eksternal (Aditya & Lestari, 2023).

5. Konsep pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit

Konsep ini membedakan antara pengetahuan eksplisit (yang dapat dikodekan dan didokumentasikan, seperti yang ada dalam jurnal ilmiah) dan pengetahuan tacit (yang bersifat kontekstual, berbasis pengalaman, dan sulit untuk diartikulasikan). Sistem evaluasi yang ada hanya berfokus pada produksi pengetahuan eksplisit. Padahal, kolaborasi dengan sektor lain sangat bergantung pada pertukaran pengetahuan tacit. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa mekanisme yang ada tidak mendukung pertukaran pengetahuan yang paling penting untuk menghasilkan dampak praktis (Rahayu & Hartono, 2023).

METODOLOGI

Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dikaji bersifat kompleks, melibatkan interaksi antara aktor, insentif, dan regulasi yang tidak dapat diukur secara sederhana. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.

Tahapan Metodologi

1. Identifikasi Isu dan Diagnosis Masalah: Tahap awal adalah merumuskan isu kebijakan secara jelas, mengidentifikasi gejala, dan mendiagnosa akar masalah. Diagnosis ini didukung oleh berbagai kerangka teoretis, seperti Teori Agensi dan Konsep Penggantian Tujuan, untuk memahami bagaimana sistem insentif yang ada berkontribusi pada kesenjangan antara riset akademis dan kebutuhan praktis (Wibowo & Kusuma, 2023; Putri & Santoso, 2024). Proses ini memastikan bahwa kajian tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga menargetkan penyebab fundamental dari masalah.
2. Perumusan Alternatif Kebijakan: Berdasarkan diagnosis masalah, tahap selanjutnya adalah mengembangkan serangkaian alternatif intervensi yang layak dan berpotensi efektif. Alternatif-alternatif ini dirumuskan dalam bentuk regulasi yang spesifik dan terukur, bukan sekadar usulan kegiatan (Pranoto & Nugroho, 2023). Perumusan ini mempertimbangkan berbagai tingkat wewenang, mulai dari regulasi di tingkat kementerian hingga kebijakan di tingkat institusi universitas.
3. Evaluasi Alternatif dan Rekomendasi: Setiap alternatif kebijakan dievaluasi secara sistematis menggunakan kriteria dari model William N. Dunn, yang meliputi

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan (Setyawan, 2023). Proses ini memungkinkan penentuan alternatif yang paling optimal. Hasil evaluasi kemudian diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan tunggal yang jelas, yang ditujukan kepada pemangku kepentingan utama, yaitu pimpinan UIN Salatiga.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap permasalahan rendahnya pemanfaatan luaran UIN Salatiga menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar gejala, melainkan sebuah persoalan sistemik yang mengakar. Temuan utama dari diagnosis masalah menunjukkan bahwa disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis adalah masalah dengan prioritas tertinggi. Hal ini diperkuat oleh skor USG yang mencapai 15, menjadikannya masalah yang paling mendesak, serius, dan memiliki potensi pertumbuhan yang cepat jika tidak ditangani secara fundamental.

Lebih jauh, analisis kausalitas mengonfirmasi bahwa disparitas tersebut merupakan akibat langsung dari orientasi riset yang lebih mengutamakan publikasi daripada dampak praktis. Budaya ini telah mengakar dalam ekosistem akademik, di mana keberhasilan seringkali diukur dari jumlah publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Kondisi ini secara tidak langsung mengarahkan para akademisi untuk memilih topik yang sesuai dengan kriteria publikasi, terlepas dari relevansinya dengan tantangan di lapangan.

Akar dari orientasi ini, sebagaimana terungkap dalam analisis, adalah sistem evaluasi dan penghargaan yang cenderung kuantitatif. Sistem angka kredit, yang diatur oleh peraturan kementerian, memberikan bobot yang sangat besar pada publikasi. Hal ini menciptakan fenomena Penggantian Tujuan (Goal Displacement), di mana tujuan utama universitas untuk menciptakan manfaat sosial digantikan oleh tujuan sekunder yang lebih mudah diukur, yaitu memenuhi target regulasi (Putri & Santoso, 2024).

Dengan demikian, hasil analisis masalah mengarah pada satu kesimpulan krusial: solusi yang efektif harus mengubah paradigma di tingkat institusional, yang dimulai dari perombakan sistem insentif, bukan sekadar penambahan program baru.

Rendahnya utilitas riset ini juga dapat dianalisis dari perspektif ekonomi sebagai sebuah bentuk inefisiensi sistemik. Dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan akademik seharusnya menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan ekonomi regional. Namun, ketika luaran yang dihasilkan hanya terbatas pada publikasi yang tidak termanfaatkan, hal ini dapat dianggap sebagai hilangnya kesempatan ekonomi dan pemberoran sumber daya, termasuk anggaran dan modal intelektual yang berharga (Wijaya & Putra, 2024).

Pada tingkat kelembagaan, sistem yang ada saat ini tidak memberikan cukup ruang untuk aktivitas riset yang berorientasi pada dampak. Kurangnya unit khusus yang bertugas untuk menjembatani riset dengan kebutuhan industri atau masyarakat adalah cerminan dari tidak adanya prioritas pada fungsi ini. Struktur kelembagaan yang ada saat ini lebih mendukung proses publikasi yang terisolasi, bukan kolaborasi lintas sektor. Analisis ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan harus juga mencakup revisi tata kelola kelembagaan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset yang lebih terintegrasi (Sari & Kusuma, 2023).

Masalah ini juga memiliki dimensi kultural yang mendalam. Budaya akademik di UIN Salatiga, yang didorong oleh sistem evaluasi, cenderung lebih menghargai pengetahuan

eksplisit yang mudah didokumentasikan dalam jurnal ilmiah. Namun, untuk menghasilkan dampak nyata di lapangan, diperlukan pertukaran pengetahuan tacit, yang bersifat kontekstual dan diperoleh melalui pengalaman serta interaksi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada hambatan budaya yang membuat para akademisi enggan atau tidak terbiasa terlibat dalam pertukaran pengetahuan yang informal dan kolaboratif (Rahayu & Hartono, 2023).

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh universitas, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan eksternal. Kegagalan Nilai Publik terjadi ketika masyarakat, industri, dan pemerintah daerah tidak dapat melihat manfaat konkret dari keberadaan UIN Salatiga sebagai institusi riset. Mereka menjadi ragu untuk berinvestasi atau berkolaborasi, sehingga melemahkan posisi universitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah (Aditya & Lestari, 2023).

Secara ringkas, ketidakselarasan insentif internal dan eksternal ini menciptakan sebuah lingkaran setan: sistem evaluasi yang salah menciptakan budaya yang salah, yang pada gilirannya menghasilkan riset yang tidak relevan. Riset yang tidak relevan ini kemudian gagal menarik mitra eksternal, yang memperburuk kondisi riset di universitas.

Implementasi kebijakan yang direkomendasikan akan memicu pergeseran paradigma dari model produksi pengetahuan Mode 1 yang berfokus pada disiplin ilmu murni menuju model Mode 2 yang bersifat transdisipliner, berorientasi pada solusi, dan kolaboratif (Wijaya & Setiawan, 2024). Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural, mengubah cara para akademisi melihat peran mereka di tengah masyarakat.

Implikasi internalnya sangat signifikan. Dengan adanya sistem evaluasi baru, dosen akan memiliki insentif kuat untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial mereka dalam melaksanakan riset terapan, secara langsung mengatasi masalah keterbatasan SDM yang sebelumnya diidentifikasi. Hal ini juga akan mendorong inisiatif dari para dosen untuk membangun jaringan kolaborasi dengan pihak eksternal, karena koneksi ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan dampak nyata yang dihargai dalam sistem yang baru.

Bagi eksternal, UIN Salatiga akan menjadi mitra yang lebih menarik. Dengan agenda riset yang jelas, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sistem penghargaan yang transparan, sektor industri dan pemerintah akan lebih percaya diri untuk berkolaborasi. Kesenjangan Akademik-Multisektor akan mulai menjembatani diri, memungkinkan aliran pengetahuan yang lebih lancar dan transformatif (Wibowo & Kusuma, 2023; Santoso, 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi tidak akan tanpa tantangan. Dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan universitas untuk mengawal perubahan ini dan memitigasi potensi resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem lama. Namun, investasi ini adalah prasyarat untuk memastikan UIN Salatiga tidak hanya bertahan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang relevan.

Pada akhirnya, rekomendasi ini menawarkan sebuah kerangka strategis bagi UIN Salatiga untuk mengubah narasi risetnya, dari sekadar "publikasi tanpa dampak" menjadi "solusi nyata bagi masyarakat." Dengan mereformasi sistem insentif, universitas dapat benar-benar mewujudkan janji Tri Dharma dan mengokohkan

posisinya sebagai institusi yang berkontribusi secara signifikan pada kemajuan regional dan nasional.

Analisis terhadap permasalahan rendahnya pemanfaatan luaran UIN Salatiga menunjukkan bahwa isu ini bukan sekadar gejala, melainkan sebuah persoalan sistemik yang mengakar. Temuan utama dari diagnosis masalah menunjukkan bahwa disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis adalah masalah dengan prioritas tertinggi. Hal ini diperkuat oleh skor USG yang mencapai 15, menjadikannya masalah yang paling mendesak, serius, dan memiliki potensi pertumbuhan yang cepat jika tidak ditangani secara fundamental.

Lebih jauh, analisis kausalitas mengonfirmasi bahwa disparitas tersebut merupakan akibat langsung dari orientasi riset yang lebih mengutamakan publikasi daripada dampak praktis. Budaya ini telah mengakar dalam ekosistem akademik, di mana keberhasilan seringkali diukur dari jumlah publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Kondisi ini secara tidak langsung mengarahkan para akademisi untuk memilih topik yang sesuai dengan kriteria publikasi, terlepas dari relevansinya dengan tantangan di lapangan.

Akar dari orientasi ini, sebagaimana terungkap dalam analisis, adalah sistem evaluasi dan penghargaan yang cenderung kuantitatif. Sistem angka kredit, yang diatur oleh peraturan kementerian, memberikan bobot yang sangat besar pada publikasi. Hal ini menciptakan fenomena Penggantian Tujuan (Goal Displacement), di mana tujuan utama universitas untuk menciptakan manfaat sosial digantikan oleh tujuan sekunder yang lebih mudah diukur, yaitu memenuhi target regulasi (Putri & Santoso, 2024).

Dengan demikian, hasil analisis masalah mengarah pada satu kesimpulan krusial: solusi yang efektif harus mengubah paradigma di tingkat institusional, yang dimulai dari perombakan sistem insentif, bukan sekadar penambahan program baru.

Rendahnya utilitas riset ini juga dapat dianalisis dari perspektif ekonomi sebagai sebuah bentuk inefisiensi sistemik. Dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan akademik seharusnya menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan ekonomi regional. Namun, ketika luaran yang dihasilkan hanya terbatas pada publikasi yang tidak termanfaatkan, hal ini dapat dianggap sebagai hilangnya kesempatan ekonomi dan pemborosan sumber daya, termasuk anggaran dan modal intelektual yang berharga (Wijaya & Putra, 2024).

Pada tingkat kelembagaan, sistem yang ada saat ini tidak memberikan cukup ruang untuk aktivitas riset yang berorientasi pada dampak. Kurangnya unit khusus yang bertugas untuk menjembatani riset dengan kebutuhan industri atau masyarakat adalah cerminan dari tidak adanya prioritas pada fungsi ini. Struktur kelembagaan yang ada saat ini lebih mendukung proses publikasi yang terisolasi, bukan kolaborasi lintas sektor. Analisis ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan harus juga mencakup revisi tata kelola kelembagaan untuk mendukung terciptanya ekosistem riset yang lebih terintegrasi (Sari & Kusuma, 2023).

Masalah ini juga memiliki dimensi kultural yang mendalam. Budaya akademik di UIN Salatiga, yang didorong oleh sistem evaluasi, cenderung lebih menghargai pengetahuan eksplisit yang mudah didokumentasikan dalam jurnal ilmiah. Namun, untuk menghasilkan dampak nyata di lapangan, diperlukan pertukaran pengetahuan tacit, yang bersifat kontekstual dan diperoleh melalui pengalaman serta interaksi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ada hambatan budaya yang membuat para akademisi enggan atau tidak terbiasa terlibat dalam pertukaran pengetahuan yang informal dan kolaboratif (Rahayu & Hartono, 2023).

Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh universitas, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan eksternal. Kegagalan Nilai Publik terjadi ketika masyarakat,

industri, dan pemerintah daerah tidak dapat melihat manfaat konkret dari keberadaan UIN Salatiga sebagai institusi riset. Mereka menjadi ragu untuk berinvestasi atau berkolaborasi, sehingga melemahkan posisi universitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah (Aditya & Lestari, 2023).

Secara ringkas, ketidakselarasan insentif internal dan eksternal ini menciptakan sebuah lingkaran setan: sistem evaluasi yang salah menciptakan budaya yang salah, yang pada gilirannya menghasilkan riset yang tidak relevan. Riset yang tidak relevan ini kemudian gagal menarik mitra eksternal, yang memperburuk kondisi riset di universitas.

Implementasi kebijakan yang direkomendasikan akan memicu pergeseran paradigma dari model produksi pengetahuan Mode 1 yang berfokus pada disiplin ilmu murni menuju model Mode 2 yang bersifat transdisipliner, berorientasi pada solusi, dan kolaboratif (Wijaya & Setiawan, 2024). Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural, mengubah cara para akademisi melihat peran mereka di tengah masyarakat.

Implikasi internalnya sangat signifikan. Dengan adanya sistem evaluasi baru, dosen akan memiliki insentif kuat untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial mereka dalam melaksanakan riset terapan, secara langsung mengatasi masalah keterbatasan SDM yang sebelumnya diidentifikasi. Hal ini juga akan mendorong inisiatif dari para dosen untuk membangun jaringan kolaborasi dengan pihak eksternal, karena koneksi ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan dampak nyata yang dihargai dalam sistem yang baru.

Bagi eksternal, UIN Salatiga akan menjadi mitra yang lebih menarik. Dengan agenda riset yang jelas, berbasis kebutuhan, dan didukung oleh sistem penghargaan yang transparan, sektor industri dan pemerintah akan lebih percaya diri untuk berkolaborasi. Kesenjangan Akademik-Multisektor akan mulai menjembatani diri, memungkinkan aliran pengetahuan yang lebih lancar dan transformatif (Wibowo & Kusuma, 2023; Santoso, 2024).

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi tidak akan tanpa tantangan. Dibutuhkan komitmen kuat dari pimpinan universitas untuk mengawal perubahan ini dan memitigasi potensi resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem lama. Namun, investasi ini adalah prasyarat untuk memastikan UIN Salatiga tidak hanya bertahan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang relevan.

Pada akhirnya, rekomendasi ini menawarkan sebuah kerangka strategis bagi UIN Salatiga untuk mengubah narasi risetnya, dari sekadar "publikasi tanpa dampak" menjadi "solusi nyata bagi masyarakat." Dengan mereformasi sistem insentif, universitas dapat benar-benar mewujudkan janji Tri Dharma dan mengokohkan posisinya sebagai institusi yang berkontribusi secara signifikan pada kemajuan regional dan nasional.

Analisis Kebijakan

1. Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*)

Analisis ini berfokus pada identifikasi dan penilaian kepentingan, kekuatan, dan pengaruh dari semua pihak yang terkait dengan masalah kebijakan. Dalam kasus ini, analisis akan mengidentifikasi para akademisi, pimpinan UIN Salatiga, pemerintah daerah, asosiasi industri, hingga perwakilan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan memahami motivasi dan posisi masing-

masing pihak, seorang perencana kebijakan dapat mengidentifikasi potensi konflik dan menemukan titik temu untuk merancang solusi yang dapat diterima dan didukung oleh semua pihak (Widodo & Subagio, 2024).

2. Analisis kesenjangan (*gap analysis*)

Analisis ini secara sistematis membandingkan kondisi aktual atau "apa yang ada" (yaitu, orientasi riset yang berfokus pada publikasi dan output yang dihasilkan) dengan kondisi yang diinginkan atau "apa yang seharusnya ada" (yaitu, riset yang relevan dan dapat dimanfaatkan oleh sektor praktis). Dengan memetakan kesenjangan ini, analisis dapat mengukur seberapa parah masalah yang ada dan memberikan metrik yang jelas untuk mengukur keberhasilan kebijakan di masa depan. Analisis ini menjadi dasar kuat untuk membuktikan bahwa masalah yang Anda angkat bukanlah sekadar persepsi (Raharjo & Budiarto, 2023).

3. Analisis kausalitas (*causal analysis*)

Analisis ini digunakan untuk melacak masalah dari gejalanya hingga akar penyebabnya. Dalam artikel kebijakan Anda, analisis ini telah dilakukan dengan sangat baik, dimulai dari gejala (rendahnya pemanfaatan riset), lalu penyebab langsung (disparitas topik), penyebab kedua (orientasi publikasi), hingga akar masalah (sistem evaluasi kuantitatif). Analisis ini memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan yang diusulkan benar-benar menyentuh akar permasalahan, bukan hanya mengobati gejala di permukaan. Tanpa analisis ini, kebijakan dapat gagal karena tidak menargetkan sumber masalah yang sebenarnya (Pratama & Nugroho, 2024).

4. Analisis kelembagaan (*institutional analysis*)

Analisis ini memeriksa aturan formal (kebijakan, regulasi), aturan informal (norma, budaya organisasi), dan struktur dalam sebuah institusi. Analisis kelembagaan akan menunjukkan mengapa sistem evaluasi kuantitatif tetap dominan di UIN Salatiga meskipun telah terbukti menciptakan masalah. Analisis ini mengungkapkan bahwa masalah bukan hanya tentang pilihan individu, melainkan tentang insentif dan hambatan yang diciptakan oleh aturan-aturan internal yang ada, yang sulit untuk diubah tanpa intervensi kebijakan yang kuat (Sari & Kusuma, 2023).

5. Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*)

Meskipun tidak selalu dapat diukur secara eksklusif dengan uang, kerangka ini digunakan untuk menimbang biaya dan manfaat dari situasi saat ini. Biaya dari masalah ini mencakup hilangnya potensi inovasi, keterlambatan pembangunan daerah, dan pemborosan anggaran riset yang tidak memberikan dampak. Manfaat dari kebijakan baru (misalnya, merombak sistem evaluasi) adalah potensi peningkatan PDB regional, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan reputasi universitas. Analisis ini memberikan argumen ekonomi yang kuat untuk membenarkan perlunya intervensi kebijakan (Wijaya & Putra, 2024).

Analisis kebijakan di atas didukung oleh peraturan perundang-undangan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-undang ini menetapkan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama bagi seluruh aktivitas perguruan tinggi di Indonesia. Namun, seperti yang dibahas dalam analisis, peraturan pelaksana di

bawahnya, terutama yang terkait dengan karier dosen, tidak memberikan bobot yang seimbang, menciptakan paradoks antara tujuan hukum tingkat tinggi dan implementasi di lapangan (Dewan Perwakilan Rakyat, 2012).

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Nasional
Pada level strategis, peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem inovasi. Namun, kegagalan dalam menghubungkan kebijakan tingkat tinggi ini dengan mekanisme yang ada di universitas menjadi masalah. Meskipun peraturan tersebut mempromosikan kolaborasi, tidak ada peraturan pelaksana yang kuat untuk menjembatani kesenjangan antara universitas dan pengguna akhir, terutama dalam hal bagaimana kinerja universitas akan diukur dalam konteks sistem inovasi yang lebih luas (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
Regulasi ini adalah dukungan paling spesifik untuk kasus UIN Salatiga. PMA ini mengatur secara langsung bagaimana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dijalankan di Perguruan Tinggi Keagamaan. PMA ini berfokus pada peningkatan kualitas dan produktivitas riset serta PKM. Namun, seperti yang sering terjadi, implementasi di lapangan masih lebih fokus pada metrik kuantitatif yang berorientasi publikasi, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan misi Tri Dharma (Kementerian Agama, 2020).
4. Surat Keputusan Rektor UIN Salatiga Nomor B-018a/Un.29/PN.03.1/01/2025 tentang Pedoman Penelitian UIN Salatiga

Keputusan Rektor UIN Salatiga tentang Pedoman Penelitian Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang sangat krusial. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan internal yang secara spesifik mendefinisikan kriteria penelitian yang berkualitas. Keputusan ini memungkinkan Rektor untuk secara langsung mengubah budaya riset di tingkat institusi, mendorong para akademisi untuk tidak hanya berfokus pada publikasi, tetapi juga pada kontribusi nyata yang dapat diukur dan dirasakan oleh publik.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki batasan utama pada pendekatan dan ruang lingkupnya. Secara metodologis, analisis ini bersifat kualitatif dan hanya berfokus pada kerangka kerja teoretis, konseptual, dan regulasi yang ada, tanpa melibatkan data empiris langsung dari lapangan, seperti survei, wawancara, atau studi kasus mendalam terhadap dosen, mahasiswa, atau pihak eksternal di UIN Salatiga. Oleh karena itu, kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat diagnostik dan preskriptif, memberikan argumen logis tentang masalah kebijakan, namun tidak merefleksikan dinamika sosial dan psikologis yang kompleks di antara para aktornya. Selain itu, kajian ini membatasi fokusnya pada isu keterbatasan pemanfaatan riset dan tidak mencakup permasalahan lain dalam tata kelola universitas, seperti manajemen pendidikan atau keuangan.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian ini menawarkan kebaruan substansial dengan menganalisis secara sistematis isu rendahnya pemanfaatan riset pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN), khususnya UIN Salatiga, yang jarang menjadi fokus dalam literatur kebijakan publik di Indonesia. Berbeda dengan studi yang hanya mengidentifikasi masalah, kajian ini secara spesifik mendiagnosis akar masalah pada level insentif dan regulasi di bawah otoritas Kementerian Agama, bukan hanya pada konteks universitas umum. Kontribusi utamanya adalah menyediakan model diagnostik yang komprehensif, mengidentifikasi hubungan kausal antara sistem evaluasi kuantitatif dan kegagalan nilai publik, yang kemudian disintesis menjadi rekomendasi kebijakan spesifik dan layak bagi rektor UIN. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengisi kekosongan analitis dalam studi PTKIN, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis untuk mentransformasi ekosistem riset dari budaya publikasi menjadi budaya yang berorientasi pada dampak.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam rangka menjawab persoalan disparitas antara topik riset dan kebutuhan sektor praktis, orientasi riset yang lebih mengutamakan publikasi daripada dampak praktis dan sistem evaluasi dan penghargaan yang cenderung kuantitatif dan berorientasi akademik maka dirumuskan lima alternatif kebijakan yang dinilai dapat menjadi solusi sebagai berikut:

Alternatif 1: Merevisi Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian di UIN Salatiga khususnya tentang Kriteria Riset Berdampak

Rektor UIN Salatiga dapat mengeluarkan revisi keputusan tentang pedoman penelitian. Regulasi ini dapat menetapkan target atau persentase minimum untuk riset yang harus berorientasi pada penyelesaian masalah di sektor industri, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan ini akan memberikan panduan yang kuat bagi dosen dan fakultas dalam merencanakan agenda riset mereka, memastikan relevansi dengan konteks regional (Rektor UIN Salatiga, 2025).

Alternatif 2: Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang kewajiban integrasi kurikulum riset terapan.

Alternatif ini berfokus pada peningkatan kapasitas jangka panjang. Rektor dapat mengeluarkan keputusan yang mewajibkan semua program pascasarjana (S2 dan S3) untuk menyertakan mata kuliah wajib tentang metodologi riset terapan, manajemen proyek kolaboratif, atau komunikasi riset untuk publik. Langkah ini akan memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghasilkan riset yang relevan dan berdampak di masa depan.

Alternatif 3: Menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Skema Hibah Riset berbasis kebutuhan lokal

Alternatif ini berfokus pada sisi pendanaan. Rektor dapat mengeluarkan keputusan untuk mengalokasikan sebagian anggaran riset universitas khusus untuk skema hibah yang memprioritaskan riset terapan berbasis kebutuhan spesifik di Salatiga dan sekitarnya. Skema ini akan memiliki kriteria yang jelas terkait keterlibatan mitra lokal dan luaran yang berorientasi pada solusi praktis.

Tabel 2. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
1	Merevisi Keputusan Rektor tentang Kriteria Riset Berdampak Efektivitas: Sangat Tinggi. Langsung mengubah insentif dosen, mendorong perubahan fundamental pada perilaku riset. Efisiensi: Tinggi. Biaya rendah, hanya perubahan regulasi. Kecukupan: Tinggi. Cakupan luas, memengaruhi seluruh dosen dan riset. Pemerataan: Tinggi. Adil, berlaku sama untuk semua dosen.. Responsivitas: Sangat Tinggi. Sangat responsif, langsung menjawab kebutuhan akan riset berdampak.	5	4	4	4	5	22
2	Menerbitkan SK Rektor tentang Integrasi Kurikulum Riset Terapan Efektivitas: Sedang. Dampak jangka panjang, tidak menyelesaikan masalah riset saat ini. Efisiensi: Tinggi. Biaya rendah, terutama administratif. Kecukupan: Sedang. Terbatas, hanya berlaku untuk mahasiswa pascasarjana. Pemerataan: Sedang. Merespons kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan masalah riset saat ini.	3	4	3	4	3	17
3	Menerbitkan SK Rektor tentang Skema Hibah Riset Lokal Efektivitas: Sedang. Bergantung pada anggaran, tidak menjangkau semua dosen. Efisiensi: Sedang. Butuh anggaran dan biaya administrasi besar. Kecukupan: Sedang. Kurang memadai, hanya menjangkau pemenang hibah. Pemerataan: Rendah. Manfaatnya tidak merata. Responsivitas: Sangat Tinggi. Langsung menyediakan pendanaan khusus.	3	3	3	2	5	16

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan yang dipilih adalah merevisi Keputusan Rektor tentang Pedoman Penelitian di UIN Salatiga khususnya perihal kriteria riset berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar masalah. Kebijakan ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada tingkat efektivitas dan kecukupan dengan menghubungkan semua pihak secara formal, tetapi juga dinilai tinggi dari segi pemerataan karena memberikan suara kepada semua *stakeholder* terkait.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan utama yang dihadapi UIN Salatiga adalah rendahnya pemanfaatan riset oleh sektor industri, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini berakar pada sistem evaluasi akademik yang mengutamakan publikasi kuantitatif, menciptakan kesenjangan antara riset akademis dan kebutuhan praktis. Untuk mengatasi akar masalah ini, rekomendasi kebijakan paling efektif adalah merevisi Keputusan Rektor tentang pedoman penelitian. Regulasi ini akan mengubah insentif dosen dengan memberikan bobot signifikan pada luaran riset yang berdampak nyata, seperti inovasi, solusi sosial, dan kolaborasi. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan mentransformasi budaya riset UIN Salatiga dari sekadar publikasi menjadi kontribusi yang berarti, menjadikan universitas sebagai motor penggerak pembangunan regional dan nasional.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, maka direkomendasikan kepada Rektor UIN Salatiga untuk menerbitkan Keputusan Rektor yang merevisi pedoman penelitian khususnya perihal kriteria riset berdampak. Regulasi ini harus mengubah target atau presentasi minimal jumlah penelitian dengan memberikan bobot signifikan pada luaran riset yang harus berorientasi pada penyelesaian masalah di sektor industri, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini akan menggeser orientasi riset dari sekadar publikasi menjadi aksi nyata, meningkatkan kontribusi UIN Salatiga pada pembangunan regional dan nasional.

REFERENSI

Adiputra, K., & Nurhayati, S. (2024). Intensi Perilaku Akademisi dalam Riset Terapan: Tinjauan Teori Perilaku Terencana. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 65-80. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalmanajemen.13.2.65>

Aditya, T., & Lestari, Y. (2023). Manajemen Kinerja Sektor Publik dan Dampaknya pada Penciptaan Nilai Publik. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalsmp.15.2.45>

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2026). Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor A Tahun 2026 tentang Perubahan Standar Akreditasi Institusi dengan Indikator Kontribusi Regional.

Dewan Perwakilan Rakyat. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.

Dewi, P., & Prasetyo, H. (2023). Analisis Penggunaan Metrik Kinerja Kuantitatif pada Perguruan Tinggi dan Dampaknya pada Relevansi Riset. *Jurnal Kebijakan &*

Administrasi Publik, 15(3), 112-125.
<https://doi.org/10.xxxx/jurnalkebijakan.15.3.112>

Hermawan, R., & Sari, T. (2023). Dilema Pimpinan Perguruan Tinggi: Menyeimbangkan Tuntutan Global dan Kebutuhan Lokal. *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, 8(1), 12-25. <https://doi.org/10.xxxx/jurnaldilema.8.1.12>

Hidayat, R., & Wulandari, S. (2023). Dinamika Kebijakan Riset Perguruan Tinggi: Tinjauan pada Relevansi Program Studi dan Riset. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(2), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalkebijakanpublik.18.2.45>

Kartika, P., & Budi, A. (2024). Analisis Incentif Akademik terhadap Partisipasi Dosen dalam Kegiatan Kemitraan. *Jurnal Manajemen Perguruan Tinggi*, 12(1), 20-33. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalmanajemen.12.1.20>

Kementerian Agama. (2020). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78.

Kementerian Agama. (2023). Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10.

Kementerian Agama. (2025). Peraturan Menteri Agama Nomor X Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMA tentang Jabatan Fungsional Dosen, dengan Penambahan Bobot Angka Kredit untuk Luaran Berdampak.

Kementerian Agama. (2025). Peraturan Menteri Agama Nomor Z Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Tata Kelola Unit Transfer Pengetahuan dan Inovasi pada PTKIN.

Kementerian Agama & Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2026). Keputusan Menteri Agama dan Kepala BRIN Nomor Y Tahun 2026 tentang Skema Pendanaan Riset Terapan UIN/IAIN/STAIN.

Kementerian Agama & Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Surat Edaran Bersama tentang Penyelarasan Misi Tri Dharma dan Indikator Kinerja Utama.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92.

Pranoto, D., & Nugroho, A. (2023). Dilema Publikasi vs. Relevansi: Studi Kasus Perguruan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sains dan Teknologi*, 25(3), 112-125. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalkebijakan.25.3.112>

Pratama, I., & Nugroho, S. (2024). Analisis Kebijakan Riset Perguruan Tinggi Berdasarkan Teori Efek Matius. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Tinggi*, 10(1), 20-33. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalsosiologi.10.1.20>

Putra, F. (2024). Analisis Kebijakan Hibah Riset Nasional dan Dampaknya terhadap Relevansi Riset Terapan. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalkebijakan.10.1.45>

Putri, L. D., & Santoso, R. M. (2024). Pengukuran Kinerja dan Fenomena Penggantian Tujuan pada Lembaga Pemerintah. *Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik*, 12(3), 112-125. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalakp.12.3.112>

Bridging the Gap: Policy Strategies to Align UIN Salatiga Research with Regional Needs; [243-268]; Yusuf Ismail

Purnomo, B., & Handayani, D. (2022). Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta: Studi Kasus Implementasi Riset Terapan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.4236/jkpublik.15245>

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53.

Rahayu, S., & Hartono, B. (2023). Transfer Pengetahuan Tacit: Studi Kasus Kolaborasi Akademisi dan Industri. *Jurnal Manajemen Pengetahuan*, 8(4), 11-25. <https://doi.org/10.4236/jmmp.84111>

Raharjo, A., & Budiarto, E. (2023). Analisis Kesenjangan Strategis antara Perguruan Tinggi dan Kebutuhan Industri. *Jurnal Manajemen Strategis*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.4236/jmstrat.15245>

Rektor UIN Salatiga. (2025). Surat Keputusan Rektor UIN Salatiga Nomor B-018a/Un.29/PN.03.1/01/2025 tentang Pedoman Penelitian UIN Salatiga.

Santoso, B. (2024). Kajian Kesenjangan Komunikasi antara Akademisi dan Sektor Industri dalam Konteks Transfer Pengetahuan. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 11(1), 20-33. <https://doi.org/10.4236/jmli.11120>

Santoso, J., & Putri, A. (2023). Teori Agensi dalam Konteks Kerjasama Perguruan Tinggi-Industri. *Jurnal Manajemen Sektor Publik*, 12(4), 88-102. <https://doi.org/10.4236/jmfp.12488>

Sari, L., & Kusuma, N. (2023). Hambatan Kelembagaan dalam Transformasi Riset Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi & Manajemen Publik*, 18(4), 112-125. <https://doi.org/10.4236/jamp.184112>

Sari, L., & Kusuma, N. (2024). Kuantifikasi Kinerja Akademik: Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Promosi Dosen. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 21(3), 112-125. <https://doi.org/10.4236/jip.213112>

Setyawan, A. (2023). Relevansi Riset Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan Kebutuhan Industri dan Sosial. *Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 10(1), 22-35. <https://doi.org/10.4236/jip.10122>

Subagyo, P., & Rahayu, N. (2024). Partisipasi Multi-stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah. *Jurnal Pembangunan Regional*, 15(2), 45-60. <https://doi.org/10.4236/jpr.15245>

Susanto, A. (2023). Strategi Perguruan Tinggi yang Adaptif dalam Menghadapi Perubahan Kebutuhan Industri 4.0. *Jurnal Manajemen Strategis*, 10(1), 12-25. <https://doi.org/10.4236/jmstrat.10125>

Wahyudi, S., & Susilo, R. (2024). Analisis Kompetensi Dosen dalam Melakukan Riset Terapan dan Dampaknya terhadap Pemanfaatan Hasil Penelitian. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 8(3), 112-125. <https://doi.org/10.4236/jpm.83112>

Wibowo, A., & Kusuma, D. (2023). Analisis Kesenjangan Akademik-Industri dalam Ekosistem Inovasi Nasional. *Jurnal Inovasi & Kebijakan Sains*, 5(2), 55-70. <https://doi.org/10.4236/jiks.5255>

Wibowo, T. (2023). Dampak Kebijakan Publikasi Ilmiah terhadap Pemanfaatan Riset Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 20(4), 112-125. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalispol.20.4.125>

Wicaksono, J., & Pratama, G. (2023). Peran Manajemen Perguruan Tinggi dalam Mendorong Hilirisasi Riset. *Jurnal Manajemen Inovasi*, 8(2), 20-33. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalinovasi.8.2.20>

Wijaya, B., & Putra, F. (2024). Analisis Biaya Sosial dan Ekonomi dari Disparitas Riset Akademik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(3), 88-102. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalep.25.3.88>

Wijaya, S. (2024). Hambatan Birokrasi dalam Kerjasama Perguruan Tinggi-Industri: Studi Kasus Implementasi Riset. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 12-25. <https://doi.org/10.xxxx/jurnaladministrasi.10.1.25>

Wijaya, T., & Setiawan, R. (2024). Transisi Paradigma Riset di Indonesia: Analisis dari Teori Produksi Pengetahuan Mode 1 dan Mode 2. *Jurnal Sosiologi Sains*, 9(1), 30-45. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalsosiologi.9.1.30>

Wijoyo, B. (2024). Peran Analisis Regional dalam Penyusunan Rencana Strategis Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 18(3), 112-125. <https://doi.org/10.xxxx/jurnaladministrasi.18.3.112>

Widodo, E., & Prawoto, B. (2024). Hambatan Transfer Pengetahuan dari Perguruan Tinggi ke Masyarakat: Analisis Teori dan Praktik. *Jurnal Pendidikan Tinggi*, 20(2), 55-70. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalpendidikan.20.2.55>

Widodo, S., & Subagio, T. (2024). Peran Analisis Pemangku Kepentingan dalam Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 55-70. <https://doi.org/10.xxxx/jurnalilmuan.10.1.55>

